

## P-14

**ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH**  
**LOCAL OWN-SOURCE REVENUE DETERMINANT ANALYSIS**

**Jouzar Farouq Ishak<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Bandung, Jalan Gegerkalong Hilir, Bandung Barat

\*E-mail: [jouzar.farouq@polban.ac.id](mailto:jouzar.farouq@polban.ac.id)

Diterima 24-10-2021	Diperbaiki 25-10-2021	Disetujui 26-10-2021
---------------------	-----------------------	----------------------

**ABSTRAK**

*Pada tahun 2020, perekonomian global sangat terdampak oleh adanya pandemi Covid-19 tidak terkecuali bagi Indonesia. Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2020 hanya sebesar Rp250,3 triliun di mana terjadi penurunan 5,3 persen dari posisi tahun 2019. Pendapatan asli daerah pada tahun 2020 terhadap pendapatan keseluruhan daerah memperoleh 22,06 persen jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mendapatkan 24 sampai dengan 25 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penelitian ini mempunyai tujuan dengan menganalisis determinan pendapatan asli daerah yang terjadi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Pemerintah Provinsi merupakan populasi dalam penelitian ini. Metode pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan serta apabila dilihat dari waktu pengumpulan menggunakan data panel. Data panel penelitian ini terdiri dari data 27 Pemerintah Provinsi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan model regresi. Hasil penelitian ini menawarkan penjelasan tentang pendapatan-pendapatan daerah terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan meningkat ketika pandemi dan setelah pandemi Covid-19 ini selesai dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah. Salah satu kunci kesuksesan dalam upaya akselerasi pendapatan asli daerah dengan inovasi yang dilakukan sehingga pemerintah daerah dapat mandiri dalam pengelolaan daerahnya. Optimalisasi potensi daerah diperlukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

**Kata kunci:** pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, pendapatan asli daerah

**ABSTRACT**

*In 2020, the global economy was greatly affected by the Covid-19 pandemic, and Indonesia was no exception. The realization of local own source revenue in 2020 was only IDR 250.3 trillion, which was a decrease of 5.3 percent from the position in 2019. Local own source revenue in 2020 to the overall regional income was 22.06 percent, much lower than in previous years. 24 to 25 percent of the Local Government Budget. This study aims to analyze the determinants of Local own source revenue that occurs in the Provincial Government in Indonesia. The Provincial Government is the population in this study. The sample selection method used purposive sampling. Secondary data is the type of data used and when viewed from the time of collection using panel data. This research panel data consists of data from 27 Provincial Governments from 2010 to 2020. To analyze data, this study applies regression model. The result of this study offer explain local own source revenue. This study highlights the importance of local own source revenue for provincial government. This study expands our understanding of increasing local own source revenue. Which is expected to increase during the pandemic and after the Covid-19 pandemic is over with various efforts made by the Regional Government. One of the keys to success in efforts to accelerate local revenue is through innovation so that local governments can be independent in managing their regions. Optimization of regional potential is needed to be able to improve the welfare of the people.*

**Keywords:** local taxes, retribution, results of separated regional wealth management, other lawful local own source revenue, local own source revenue

## PENDAHULUAN

Saat ini kita sedang menghadapi pandemi sindrom pernafasan akut yang pertama kali muncul di Wuhan, China. Tak lama setelah identifikasi kasus, *a novel human coronavirus* (CoV), yang secara resmi disebut sebagai sindrom pernafasan akut yang parah *coronavirus 2* (SARS-CoV-2), diidentifikasi sebagai virus yang bertanggung jawab dari wabah yang meningkat ini [1], [2]. Penyakit terkait, secara resmi disebut penyakit *coronavirus 2019* (Covid-19), telah dikonfirmasi di sekitar 220 juta kasus di seluruh dunia dengan lebih dari 4,5 juta kematian. Sesuai dengan namanya, virus ini memiliki kemiripan dengan SARS-CoV yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002-2003. Di seluruh tingkat genom, SARS-CoV-2 memiliki  $\pm 80\%$  identitas dengan SARS-CoV.2

Di seluruh dunia, langkah-langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang diambil untuk mencegah penyebaran penyakit, sementara pada saat yang sama berusaha untuk menahan pengaruhnya terhadap ekonomi di mana kemampuan suatu negara untuk secara efektif menanggapi pandemi Covid-19 dan efek yang menyertainya bergantung pada ruang fiskalnya [3]. Sebagian besar penelitian tentang dampak sosial ekonomi dari pandemi berfokus pada tingkat pemerintah pusat dengan hanya sedikit yang mempertimbangkan tingkat daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah [4].

Pada tahun 2020, perekonomian global sangat terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 tidak terkecuali bagi Indonesia. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 hanya sebesar Rp250,3 triliun di mana angka ini menunjukkan penurunan 5,3 persen dari posisi tahun sebelumnya yakni tahun 2019 yang sebesar Rp293,6 triliun. Secara jumlah, pendapatan asli daerah pada tahun 2020 terhadap pendapatan keseluruhan daerah memperoleh 22,06 persen, jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya mendapatkan 24 sampai dengan 25 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam pelaksanaan otonomi di suatu daerah, maka daerah tersebut diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya, termasuk mencari kesanggupan pendapatan daerahnya di mana diwujudkan dalam bentuk pendapatan asli daerah [5]. Manfaat dari pendapatan asli daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah

berdasarkan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi [6].

Penelitian tentang pendapatan asli daerah telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. Pajak daerah memiliki kriteria yang baik terhadap pendapatan asli daerah dan berpengaruh positif di mana apabila tingkat kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan maka pendapatan asli daerah pun terjadi kenaikan [7]. Terkait dengan retribusi daerah, menurut [8] bahwa dibandingkan dengan komponen pendapatan asli daerah lainnya, penerimaan dari sektor retribusi daerah memberikan peranan yang nampak kenaikan pendapatan asli daerah.

Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuatif yang tinggi hasil penelitian yang dilakukan [9] di mana realisasi penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan termasuk dalam kategori sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah. [10] menemukan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, meskipun rendahnya penerimaan tersebut tidak sesuai dengan laju objek dan sarana wisata yang mendukung pendapatan asli daerah.

Mengacu pada celah penelitian yang teridentifikasi, penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Studi ini dalam perspektif praktis akan membantu pengambil keputusan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan asli daerah.

Studi tentang pendapatan asli daerah telah ditelaah oleh beberapa peneliti seperti mengenai pajak daerah [5], [7], [11], [12]; retribusi daerah [5], [7], [11], [12]; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan [9], [13]; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah [10], [14], [15]. Sesuai dengan tinjauan literatur-literatur sebelumnya maka penelitian ini mempunyai tujuan dengan menganalisis determinan pendapatan asli daerah yang terjadi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia. Pengembangan-pengembangan dari penelitian di atas dengan menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi

objek adalah Pemerintah Provinsi di Indonesia serta analisis data menggunakan analisis data panel untuk periode 11 tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Penelitian ini dalam subjek mengambil seluruh komponen yang terdapat pada pendapatan asli daerah.

Studi ini dimulai dengan meninjau literatur utama penelitian ini yaitu pendapatan asli daerah. Kemudian pendekatan metodologi yang diambil dalam penelitian ini, diikuti oleh hasil dan pembahasan serta terakhir kesimpulan dan saran agar penelitian selanjutnya menjadi lebih baik.

## METODOLOGI

Pemerintah Provinsi merupakan populasi dalam penelitian ini. Metode pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel di sini terbatas yang sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti [16]–[18]. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 1) Pemerintah Provinsi di Indonesia; 2) data anggaran dan pendapatan belanja daerah selama 11 tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020; dan 3) memiliki data variabel penelitian. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka jumlah sampel penelitian ini adalah 27 Pemerintah Provinsi.

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan serta apabila dilihat dari waktu pengumpulan menggunakan data panel. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu [18]–[20]. Data panel penelitian ini terdiri dari data 27 Pemerintah Provinsi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah serta penelitian ini menggunakan variabel terikat adalah pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk dilakukan pengujian pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

Model regresi menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen [18], [20], [21]. Pengujian dugaan dapat menggunakan uji F dan uji t. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara

simultan. [20] menyatakan bahwa uji t digunakan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen mempunyai pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang terdapat dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen [18], [20]. Untuk memenuhi persyaratan penggunaan model regresi dilakukan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan hasil uji asumsi klasik berupa ringkasan hasil uji multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan normalitas sebagai syarat pemenuhan analisis regresi.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Uji

	VIF	Tolerance	Asymp. Sig.
Konstan			,287
Pajak Daerah	8,115	,123	
Retribusi Daerah	1,854	,539	
HPKYD	3,644	,274	
Lain-lain	6,645	,151	

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengetahuan untuk akuntansi sektor publik terutama pendapatan asli daerah. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah.

Pertama, penelitian ini menemukan bahwa terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang dapat dilihat pada tabel 2. Hasil ini koheren dengan penelitian sebelumnya yang menggarisbawahi dampak pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah [5], [7], [11], [12]. Dugaan tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka pendapatan asli daerah tersebut pun akan meningkat. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi masih sangat mengandalkan untuk pendapatan asli daerah berasal dari kontribusi pajak daerah [22], [23].

Temuan pada tabel 2. menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan dugaan tang kedua, di mana setelah dilakukan pengujian dugaan ini diterima dan hubungan yang positif. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa retribusi

daerah signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah [5], [11].

Tabel 2. Hasil Regresi

	t	Sig	F
Konstan			,000
Pajak Daerah	21,897	,000	
Retribusi Daerah	10,947	,000	
HPKYD	6,422	,000	
Lain-lain	3,385	,000	

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya.

Selanjutnya untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bahwa kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mempunyai efek terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya [13]. Sumber pendapatan asli daerah selain pajak daerah dan retribusi daerah adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD sah yang harus dimaksimalkan agar daerah tidak ketergantungan terhadap dua komponen yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap pendapatan asli daerah.

## KESIMPULAN

Pada tahun 2020, perekonomian global sangat terdampak pandemi Covid-19 tidak terkecuali bagi Indonesia. Pendapatan asli daerah yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah pun berkontraksi di era pandemi Covid-19. Penelitian ini menilai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah dalam konteks pemerintah provinsi. Penelitian ini mengarahkan pada kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa variabel yang diteliti berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan meningkat ketika pandemi dan setelah pandemi Covid-19 ini selesai dengan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah. Salah satu kunci kesuksesan dalam upaya akselerasi pendapatan asli daerah dengan inovasi yang dilakukan sehingga pemerintah daerah dapat mandiri dalam pengelolaan daerahnya. Optimalisasi potensi daerah

diperlukan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## SARAN

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperluas pengetahuan tentang pendapatan asli daerah selama pandemi Covid-19. Namun, penelitian ini mempunyai keterbatasan. Pertama, data untuk penelitian hanya berasal dari Pemerintah Provinsi sehingga batasan menyamaratakan temuan Pemerintah Daerah. Masalah ini diselesaikan dengan mereplikasi penelitian ini pada berbagai Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota. Kedua, penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan variabel yang dipilih untuk dimasukkan pendapatan asli daerah. Secara teoritis, variabel-variabel dalam penelitian ini maka penelitian selanjutnya di mana pendapatan asli daerah juga dipengaruhi oleh dana perimbangan, belanja, dan pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] P. Zhou *et al.*, "A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin," *Nature*, vol. 579, no. 7798, pp. 270–273, 2020, doi: 10.1038/s41586-020-2012-7.
- [2] N. Zhu *et al.*, "A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019," *N. Engl. J. Med.*, vol. 382, no. 8, pp. 727–733, 2020, doi: 10.1056/nejmoa2001017.
- [3] A. Ejiogu, O. Okechukwu, and C. Ejiogu, "Nigerian budgetary response to the COVID-19 pandemic and its shrinking fiscal space: financial sustainability, employment, social inequality and business implications," *J. Public Budgeting, Account. Financ. Manag.*, vol. 32, no. 5, pp. 919–928, 2020, doi: 10.1108/JPBAFM-07-2020-0101.
- [4] J. Nemeč and D. Špaček, "The Covid-19 pandemic and local government finance: Czechia and Slovakia," *J. Public Budgeting, Account. Financ. Manag.*, vol. 32, no. 5, pp. 837–846, 2020, doi: 10.1108/JPBAFM-07-2020-0109.
- [5] P. Rizqy Ramadhan, "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera

- Utara,” *J. Akunt. DAN BISNIS J. Progr. Stud. Akunt.*, vol. 5, no. 1, pp. 81–87, 2019, doi: 10.31289/jab.v5i1.2455.
- [6] J. F. Ishak, Y. P. Sari, Y. Dwitayanti, and H. A. Mauluddi, “The Determinant Factors of Capital Expenditure,” *Ilomata Int. J. Tax Account.*, vol. 2, no. 2, pp. 158–165, 2021.
- [7] R. F. Meinanda and A. Y. Larassati, “Pengaruh kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah,” *J. Ris. Akunt. dan Perbank.*, vol. 15, no. 2, pp. 536–551, 2021.
- [8] A. M. S. A. Yahaya and R. Agusta, “Peranan Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba,” *J. Appl. Manag. Account.*, vol. 4, no. 1, pp. 33–41, 2020, doi: 10.30871/jama.v4i1.1909.
- [9] U. Funangi, J. A. Mollet, and C. M. Bisay, “Analisis efektifitas dan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah,” *J. Kaji. Ekon. Dan Keuang. Drh.*, pp. 43–62, 2016.
- [10] Y. Hafandi and R. Romandhon, “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo,” *J. Econ. Manag. Account. Technol.*, vol. 3, no. 2, pp. 182–191, 2020, doi: 10.32500/jematech.v3i2.1337.
- [11] L. Anasta and N. Nengsih, “Peranan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah,” *J. Profita*, vol. 12, no. 1, pp. 50–55, 2019, doi: 10.22441/profita.2019.v12.01.004.
- [12] R. Usman, “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah,” *JAF- J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 87–103, 2017.
- [13] A. Aqdas, N. Zukhri, and D. Yanuar, “Kinerja keuangan Kabupaten Belitung Timur: Kontribusi dan efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah,” *Equity J. Ekon.*, vol. 9, no. 1, pp. 1–10, 2021, doi: 10.33019/equity.v9i1.63.
- [14] A. Prabawa, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyumas,” *J. Ekon. Univ. Wijayakusuma Purwokerto*, vol. 12, no. 3, pp. 138–151, 2009.
- [15] Z. R. H. Hasibuan, “Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah,” 2020.
- [16] C. Andrade, “The Inconvenient Truth About Convenience and Purposive Samples,” *Indian J. Psychol. Med.*, vol. 43, no. 1, pp. 86–88, 2021, doi: 10.1177/0253717620977000.
- [17] S. Campbell *et al.*, “Purposive sampling: complex or simple? Research case examples,” *J. Res. Nurs.*, vol. 25, no. 8, pp. 652–661, 2020, doi: 10.1177/1744987120927206.
- [18] U. Sekaran and R. Bougie, *Reserach Methods for Bussiness A Skill-Bulding Approach*. 2016.
- [19] H. Xu, S. Hwan Lee, and T. Ho Eom, “Introduction to Panel Data Analysis,” no. April 2020, 2007, doi: 10.1201/9781420013276.ch32.
- [20] D. N. Gujarati, *Basic Econometric*. .
- [21] J. I. Daoud, “Multicollinearity and Regression Analysis,” *J. Phys. Conf. Ser.*, vol. 949, no. 1, 2018, doi: 10.1088/1742-6596/949/1/012009.
- [22] H. Setiono, “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur,” *J. Ris. Akunt. dan Keuang.*, vol. 1, no. 1, pp. 22–28, 2018.
- [23] D. Sartika, A. Ulfa, and A. Ilyas, “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat,” *J. Ekon. bisnis dharma andalas*, vol. 21, no. 1, pp. 32–53, 2019.